

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 68 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 68 Seri E), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUB ERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021-2024

PELAKSANAAN 5 (LIMA) PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
 TAHUN 2021-2024

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan untuk tambahan asupan gizi	Persen	80	80	80	90	Dinas Kesehatan
		Persentase kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil	Persen	91	92	93	94	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Hamil-K4	Persen	91	93	94	94	Dinas Kesehatan
		Persentase layanan Ibu Nifas	Persen	95	96	96	96	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pendampingan Bumil Risti (Bunda Anak	Orang	2.500	2.500	1.000	1.000	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Impian/ BUAIAN)						
		Persentase ibu hamil yang menerima pendampingan	Persen	-	-	-	90	BKKBN
		Jumlah pendampingan Bumil KEK	Orang	2.600	2.600	1.000	1.000	Dinas Kesehatan
2	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	81	82	83	84	Dinas Kesehatan
3	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan MPASI untuk bayi mulai usia 6 bulan	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Persen	40	45	50	55	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/ kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI EKSLUSIF > 50%	Kab/Kota	37	38	38	38	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia 6-23 bulan yang mendapat MPASI	Persen	-	-	-	80	Dinas Kesehatan
4	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Presentase anak berusia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia 24 - 59 bulan gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laksana gizi buruk						
		Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persen	70	75	80	85	Dinas Kesehatan
		Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	-	-	-	90	Dinas Kesehatan
5	Pemantauan pertumbuhan di Posyandu	Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	Persen	70	75	80	85	Dinas Kesehatan
		Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A	Persen	87	88	89	90	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persen	-	-	-	90	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persen	93,6	94,1	94,6	90	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap sesuai target	Kab/Kota	35	38	38	38	Dinas Kesehatan
		Persentase balita diare yang memperoleh	Persen	95	95	100	100	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		suplementasi Zinc						
		Jumlah kab/ kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target	Kab/Kota	15	15	15	17	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/ Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar	Kab/Kota	23	25	27	29	Dinas Kesehatan
		Jumlah kader dengan kompetensi Purwa	Orang	-	-	-	13.000	Dinas Kesehatan
6	Remaja Putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase remaja putri mendapatkan TTD	Persen	52	54	56	58	Dinas Kesehatan
		Persentase remaja putri yang di skrining anemia	Persen	-	-	-	90	Dinas Kesehatan
7	Tatalaksana pada pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas Melaksanakan Pendekatan MTBS	Persen	92	93	94	95	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	15	15	18	95	Dinas Kesehatan
8	Layanan gizi pada kelompok masyarakat	Tersedianya layanan Lab Gizi pada UPT Labkesda	Layanan	-	-	-	1	Dinas Kesehatan
9	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	-	-	90	BKKBN
10	Pendataan ibu hamil.	Tersedianya data ibu hamil	Data	-	-	-	1	Dinas Kesehatan
		Tersedianya data ibu hamil dengan	Data	-	-	-	1	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		anemia.						
		Tersedianya data ibu hamil KEK.	Data	-	-	-	1	Dinas Kesehatan
		Tersedianya data ibu hamil komplikasi	Data	-	-	-	1	Dinas Kesehatan
11	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas.	Persen	81,6	97,89	98.94	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
12	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten / kota lokasi prioritas.	Persen	76,92	83	89	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
13	Penerimaan Bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Tersedianya anggaran kontribusi pembayaran iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan PUS miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Juta Penduduk	-	-	-	15.056.481	Dinas Sosial
		Cakupan keluarga prasejahtera beresiko stunting penerima bantuan sosial	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
		Cakupan keluarga pra sejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Juta Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima sosial pangan	Juta Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
		Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
14	Keluarga yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah anak balita terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita	Orang	55	60	60	60	Dinas Sosial
		Jumlah Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mendapat bantuan	Orang	100	150	450	650	Dinas Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan di Luar panti	Orang	-	-	540	540	Dinas Sosial
		Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan dalam panti	Orang	-	150	-	-	Dinas Sosial
15	Promosi & kampanye gizi seimbang	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Kab/Kota	16	20	32	38	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terselenggaranya modifikasi resep	Orang	-	-	-	26	Dinas Kesehatan
		Frekuensi penayangan konten di media sosial tentang stunting	Kali	12	12	12	12	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya edukasi gizi secara kelompok di UPT Labkesda	Jam	-	-	-	27	Dinas Kesehatan
16	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Persen	69	72	75	78	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kab/Kota	-	-	-	29	Dinas Kesehatan
		Persentase Kab/Kota yang mengembangkan UKBM sesuai Standar	Persen	-	-	-	74	Dinas Kesehatan
		Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Persen	-	-	-	90	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban aman	Persen	-	-	-	10	Dinas Kesehatan
17	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan bagi Kader Pembangunan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) masing-masing Kabupaten	Kader	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Manusia (KPM)	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	-	-	-	N/A	DPMD
		Persentase kelompok penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial
18	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas TP PKK	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten / Kota yang difasilitasi	Orang	765	700	700	700	DPMD
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	KPM	5.294	10.186	10.000	3.000	DPMD
		Jumlah kader PKK Kabupaten/ Kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang	-	800	800	800	DPMD
19	Bina Keluarga Remaja	Jumlah kegiatan <i>Workshop</i> Pendidikan Keluarga	Orang	76	76	76	76	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta pertemuan penguatan kualitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AK
20	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok pekarangan Pangan Lestari yang terfasilitasi	Kelompok	4	6	8	10	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan (DPKP)
		Persentase keluarga berisiko Stunting yang	Persen	-	-	-	50	DPKP

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.						
		Jumlah Lumbung Pangan	Desa	5	5	5	5	DPKP
21	Kampanye Gemar Makan Ikan	Jumlah masyarakat terakses informasi manfaat konsumsi ikan	Orang	4.100	4.500	4.700	4.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah penyediaan pangan sehat	Kab/Kota	-	10	11	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sarana budidaya ikan skala rumah tangga	Keluarga	-	-	-	22	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Ketahanan keluarga	Jumlah kader Bina keluarga Balita/ keluarga sasaran di Kab/ Kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan anak	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AK
		Jumlah kader BKR/keluarga Remaja sasaran di Kab/ Kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan Anak	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AK
		Jumlah kader remaja yang mendapatkan capacity building tentang ketahanan keluarga	Orang	440	480	520	200	DP3AK
		Jumlah BKL yang dibina dalam rangka Ketahanan	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	DP3AK

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Keluarga						
		Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang ter Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Orang	150	150	150	300	DP3AK
23	Pembinaan KB aktif dan Kesehatan reproduksi	Jumlah peserta Pembinaan KB aktif dan Kesehatan Reproduksi	Orang	440	480	520	560	BKKBN
24	Pengendalian penduduk	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peserta	114	114	114	85	DP3AK
		Persentase Capaian peserta KB aktif	Persen	75,1	75,2	75,3	75,5	BKKBN
25	Pemenuhan hak anak	Persentase jumlah forum anak yang aktif di Kab / Kota	Persen	85	90	95	100	DP3AK
26	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	1	1	BAPPEDA
		Jumlah dokumen fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan	Dokumen	-	-	1	1	Biro Kesejahteraan Rakyat
27	Bimbingan Perkawinan bagi	Jumlah Fasilitator yang mengikuti TOT bimbingan	Orang	50	50	50	50	Kemenag

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penghulu dan Penyuluh	perkawinan bagi penghulu dan penyuluh						
28	Bimbingan perkawinan bagi calon perkawinan	Jumlah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan	Pasang	128.000	128.000	128.000	128.000	Kemenag
		Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	Persen	-	-	-	90	Kemenag
29	Bimbingan perkawinan remaja usia sekolah	Jumlah remaja usia sekolah mengikuti bimbingan perkawinan	Orang	4.740	4.740	4.740	4.740	Kemenag
30	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Kali	-	-	-	2 kali	Kemenag
31	Meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Persen	36	45	45	70	BKKBN
32	Menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Persen	19,9	17,5	16,3	15,5	BKKBN
33	Meningkatkan cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Persen	20	40	70	90	BKKBN

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.							
34	Meningkatkan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persen	60	70	80	90	BKKBN
35	Pemeriuhan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting	Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Percepatan Penurunan Stunting di Kelompok BKB	Unit	266	380	380	380	BKKBN
36	Meningkatkan PIK-R dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Repaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Persen	40	60	80	90	BKKBN
37	Pemenuhan KIT Siap Nikah anti Stunting	Tersedianya Alat Peraga KIE (Komunikasi Informasi dari Edukasi) Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kelompok PIK-R	Unit	333	380	380	380	BKKBN

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.	Persen	-	-	-	50	BKKBN
39	Meningkatkan Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persentase Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persen	20	50	70	90	BKKBN
40	Meningkatkari Kab/ Kota dengan ASFR di bawah 18 per 1000	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) dibawah 18 per 1.000.	Persen	42	50	70	90	BKKBN
41	Menurunkan unmet need	Persentase unmet need (PUS yang membutuhkan pelayanan KB tapi belum terlayani)	Persen	10	9,5	8,5	7,4	BKKBN
		Persentase penurunan unmeet need	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	BKKBN
42	Peningkatan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Persentase kabupaten/ kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Persen	2,6	50	75	100	BKKBN
43	Peningkatan pengelolaan kampung KB untuk percepatan penurunan	Jumlah Kampung KB yang sudah mengembangkan Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i> (DASHAT)	Desa	1	190	380	760	BKKBN
		Persentase desa prioritas yang melaksanakan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	stunting	Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal						
44	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Persentase desa/ kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK.	Persen	-	-	-	100	BKKBN
		Persentase TPK yang mendapatkan orientasi	Persen	-	-	-	100	BKKBN
		Persentase desa/kelurahan yang TPK- nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan.	Persen	-	-	-	100	BKKBN
		Persentase Desa/ Kelurahan memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) minimal satu Desa/ kelurahan ada 1 TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB / Kader lainnya yang mendampingi keloarga beresiko <i>Stunting</i>	Persen	90	100	100	100	BKKBN
		Persentase Tim Pendamping Keluarga (TPK) Yang terlatih	Persen	100	100	100	100	BKKBN
45	Pengawasan Makanan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu	Presentase Kabupaten/Kota yang mengintervensikan kemandirian pangan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i>	Kab/kota	N/A	N/A	N/A	21	BBPOM
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	80	82	84	90,62	BBPOM
46	Menurunkan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang tidak memenuhi syarat	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Annan	Sekolah	42	62	82	104	BBPOM

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Pembinaan Desa menuju pangan aman	Jumlah Desa Pangan Aman	Desa	19	28	37	47	BBPOM
48	Pemberian Kornunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat	Tingkat efektivitas KIE, Obat, dan Makanan yang Efektif	Indeks	73	77	80	83	BBPOM
49	Pembinaan Pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	12	18	25	32	BBPOM
50	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	Persen	-	-	-	75	BBPOM
51	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota.	kali	-	-	-	1 kali dalam 1 tahun	BAPPEDA
		Tersedianya kebijakan / peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penuruanan <i>Stunting</i>	Kali	-	-	-	38 kab/kota	BAPPEDA
		Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	Persen	-	-	-	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa/kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD
		Persentase pemerintah daerah Provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	TPPS

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		belanja daerah untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> .						
		Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	TPPS
52	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	desa	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD
53	Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>	Kanal	-	-	-	3 kanal	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	-	-	-	10	Dinas Kesehatan
54	Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memiliki rumah layak huni.	Persen	-	-	-	90	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
55	Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Shmting</i> bagi guru Pendidikan Anak	Kab/Kota	-	-	-	38	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stunting.	Usia Dini (PAUD).						
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota.	Persen	-	-	-	90	Dinas Pendidikan
		Persentase lembaga anak usia dini (PAUD) yang menggambarkan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI)	Persen	-	-	-	70	Dinas Pendidikan
56	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konevergensi program PPS	Persen	-	-	-	100	BAPPEDA
		Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa atau kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD
		Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i>	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD
		Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	-	-	-	100	DP3AK

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	-	-	-	90	BAPPEDA
		Persentase desa kelurahan yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD
58	Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase kabupaten/ kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	TPPS
59	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kab/kota/desa	Persentase desa yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun sebelumnya.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMD
60	Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan.	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat kan pendampingan.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/Output	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi.						
		Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapat kan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapat kan ASI eksklusif.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak 6 – 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapat kan imunisasi dasar lengkap.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapat kan tatalaksana kesehatan.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapat kan tambahan asupan gizi.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapat kan tata laksana gizi buruk.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
61	Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangan nya sesuai standard.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	standar/ usia.							
62	Pendataan, pendampingan dan penapisan anak usia 24-59	Persentase anak usia 24- 59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
63	Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia.	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
64	Pendampingan Catin/ CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	Cakupan Catin/ CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	Persen	-	-	-	90	BKKBN
		Persentase catin/caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	Persen	-	-	-	100	BKKBN
		Persentase catin/caPUS yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
65	Terbentuk nya tim audit kasus <i>Stunting</i> di kab/kota.	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit <i>Stunting</i>	Persen	-	-	-	100	BKKBN
66	Pelaksanaan audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase pelaksanaan audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Persen	-	-	-	100	BKKBN

No	Kegiatan	Keluaran/ <i>Output</i>	Satuan	Target Capaian				Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Diseminasi hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase diseminasi hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Persen	-	-	-	100	BKKBN
68	Tindak lanjut hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Persen	-	-	-	100	BKKBN

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001